

RENCANA KERJA OPD



BIRO ORGANISASI

SETDA PROV. KALBAR





DAFTAR ISI

RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

BAB. I.	PENDAHULUAN.	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB. II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2019	5
	A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Biro Organisasi	5
	B. Analisis Pelayanan Kinerja Biro Organisasi	32
	C. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi	34
	D. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	35
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB. III.	TUJUAN DAN SASARAN	
	A. Telaahan terhadap kebijakan nasional	47
	B. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi	47
	C. Program dan Kegiatan	48
BAB. IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB. V.	PENUTUP	52



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2018-2023, yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penataan organisasi yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Untuk itu, Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar telah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

B. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 69).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.



D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 b

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematik penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2019

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja, pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta Program Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV ROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Rencana Kerja dan besaran anggaran sesuai dengan pagu indikatif tahun 2021

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2019

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.092.546.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.822.434.850,00 atau 91,27%. Anggaran tersebut merupakan anggaran Belanja Langsung sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung dilingkungan Sekretariat Daerah dialokasikan terpusat pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun 2019, pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar terdapat 9 (sembilan) program dan 55 (lima puluh lima) kegiatan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional
- 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 1.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.4. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 1.5. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
- 1.6. Penataan dan Pemeliharaan Arsip.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Biro Organisasi. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional;
- 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin;
- 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor.



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini ditetapkan dengan maksud agar Biro Organisasi memiliki Sumber Daya Manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 3.1. Pendidikan dan Pelatihan;
- 3.2. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop;
- 3.3. Penyusunan Penetapan Kinerja.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan system pelaporan keuangan dan kinerja pada Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar sehingga tercapai tertib administrasi keuangan dan pelaporan kinerja. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 4.1. Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.2. Penyusunan LAKIP;
- 4.3. Penyusunan RENJA SKPD;
- 4.4. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;
- 4.5. Penyusunan RKA dan DPA SKPD;
- 4.6. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar sehingga tercapai tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

- 5.1. Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset;

6. Program Penataan Kelembagaan Pemeritahan Daerah

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

6.1. Kegiatan Koordinasi Tingkat Nasional di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan kegiatan Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, regional dan daerah dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, efektif dan efisien dengan tujuan terwujudnya penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah, serta mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.



6.2. Kegiatan Penyusunan Pergub Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan tujuannya agar perangkat daerah provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6.3. Kegiatan Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar

Maksud dilakukannya Penyusunan Perda Tentang Perangkat Daerah dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Peraturan Daerah yaitu untuk mewadahi urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan nilai skoring dan beban kerja serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, karakteristik dan potensi daerah.

6.4. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Maksud dilakukannya kegiatan penyusunan system informasi Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai Kelembagaan perangkat daerah yang ada di Provinsi dan Kab/Kota melalui jaringan internet. Sedangkan tujuan penyusunan aplikasi Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota adalah untuk mempermudah atau menyediakan akses data informasi mengenai Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.5. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar

Maksud diadakannya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dibidang organisasi.



Sedangkan Tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Teknis ini adalah agar tercipta sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

6.6. Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas

Maksud dari Kegiatan Pembentukan Cabang Dinas Tahun 2019 merupakan bentuk pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan cabang dinas. Sedangkan Tujuan Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 untuk memfasilitasi pembentukan susunan perangkat yang dibentuk oleh dinas dan badan pada pemerintah provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

6.7. Kegiatan Penataan Kelembagaan UPT

Maksud Kegiatan Penataan Kelembagaan dalam Pembentukan dan Perubahan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 merupakan bentuk pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur terhadap Dinas dan Badan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis.

Tujuan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 untuk memfasilitasi pembentukan susunan perangkat yang dibentuk oleh dinas dan badan pada pemerintah provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

6.8. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dari Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bentuk pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tujuan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota untuk memfasilitasi pembentukan susunan



perangkat yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

7. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

Program ini terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan, yaitu :

7.1. Kegiatan Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur UPT Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kalbar.

Maksud diselenggarakannya Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalbar adalah sebagai upaya kongkrit perbaikan proses kinerja organisasi pemerintah yang akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public serta membantu perwujudan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Selain itu juga untuk membantu terbentuknya semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana SOP yang telah dibuat atau disusun sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang dapat memberikan panduan bagi seluruh instansi Pemerintah Daerah khususnya instansi-instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

7.2. Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Tata Naskah Dinas kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- a. Sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
- b. Penyamaan persepsi terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Selain itu, sosialisasi ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadi mutasi dan rotasi jabatan terutama di lingkungan Sekretaris Dinas/Badan. Sehingga



kemungkinan terdapat pejabat yang baru belum mengetahui adanya Pergub Nomor 116 Tahun 2009 yang dijadikan pedoman dalam Pengelolaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

7.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan Pada Kabupaten/Kota.

Maksud dilaksanakannya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketatalaksanaan adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan dibidang ketatalaksanaan, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan bidang Ketatalaksanaan ini adalah :

- a. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kab/Kota dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan bidang ketatalaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

7.4. Kegiatan Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan.

Maksud diadakannya Kegiatan Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penataan ketatalaksanaan di pemerintah daerah. Sedangkan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi kebijakan terbaru dari Kementerian terkait serta mendapatkan informasi mengenai aturan terkait bidang ketatalaksanaan di Pemerintah pusat melalui kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- a. Menghadiri rapat koordinasi/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya.
- b. Diskusi, konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Kegiatan Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan ini dilaksanakan selama 3 Bulan, namun pada kenyataan kegiatan ini dilaksanakan lebih dari 3 bulan menyesuaikan dengan kegiatan dari pusat atau undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kegiatan koordinasi tingkat nasional bidang ketatalaksanaan dilaksanakan pada triwulan pertama yang direncanakan selama 3 bulan, dengan kegiatan sebagai berikut :



1. Menghadiri undangan Penyerrahan hasil Evaluasi SPBE sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/118/M.KT.03/2019 tanggal 12 Maret 2019 hal Undangan Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018.
2. Menghadiri undangan Fasilitas Pembinaan Ketatalaksanaan Pemda pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2019 di Yogyakarta sesuai dengan Telegram Kemendagri Nomor 080/2730/SJ tanggal 1 April 2019 hal Rapat Fasilitas Pembinaan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
3. Menghadiri acara Sosialisasi Penyusunan peta Proses Bisnis di Kalimantan Selatan sesuai surat undangan dari Kemenreian PAN dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/76/S.KT.02/2019 tanggal 17 Juni 2019.

7.5. Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas ini adalah untuk memberikan pedoman atau acuan mengenai Pengaturan penggunaan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya Bagi tenaga kontrak agar tercipta keseragaman dalam menggunakan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

7.6. Kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pontianak dan Luar daerah.

Maksud Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah khususnya Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Sedangkan Tujuan dari Laporan Pencapaian Penerapan (SPM) adalah terwujudnya penerapan (SPM) di Daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.



Selain itu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penyusunan laporan SPM adalah :

- a. Memonitor perkembangan penerapan SPM di Provinsi Kalbar
- b. Memonitor perkembangan penerapan masing-masing bidang SPM di Provinsi Kalbar.

7.7. Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Inovasi Pelayanan Publik adalah :

1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik.
2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

7.8. Kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Maksud dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah :

- a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
- b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga Masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah:

- a. Mendorong dan memotivasi unit-unit pelayanan di Provinsi Kalimantan Barat agar selalu dapat menjaga dan meningkatkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang ada pada unit yang bersangkutan;
- b. Data SKM dimaksud selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan demikian diharapkan kedepan kebijakan peningkatan pelayanan publik yang akan diambil dapat lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.



7.9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

Maksud dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pelayanan publik adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan pelayanan publik ini untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

7.10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov. Kalbar

Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelayanan publik ini untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur.

Program ini terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan, yaitu :

8.1. Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Provinsi Kalbar.

Maksud dilaksanakan kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2019 adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan, jabatan fungsional yang telah ditetapkan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.

Tujuan diadakannya penyusunan formasi jabatan fungsional sebagai salah satu persyaratan pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baik melalui mekanisme, pengangkatan pertama, alih jabatan maupun *inpassing*.

8.2. Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov. Kalbar Periode 2019-2024.

Maksud dari kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024, adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi instrumen yang akan memandu perubahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Dengan demikian, Road Map harus sejalan dengan prioritas pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengahnya (RPJPD/RPJMD).
- b. Menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kata lain, Road Map akan menjadi rencana induk bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Road Map menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.

Secara spesifik tujuan penyusunan Road Map reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yaitu :

- a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi;
 - Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
 - Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial;
 - Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan;



- Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Birokrasi Yang Kapabel, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
 - Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
 - Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.
- c. Menciptakan Pelayanan Publik Yang Prima, yang berfokus mewujudkan sasaran perubahan berikut ini :
 - Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
 - Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

8.3. Kegiatan Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemrov. Kalbar.

Tujuan dari pelaksanaan Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

1. Untuk membantu dan memudahkan unit kerja dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan format-format data serta langkah-langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan.
2. Sebagai bahan masukan bagi unit kerja dalam melakukan penataan kepegawaian serta bagi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana.
3. Untuk memberikan kejelasan tentang tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang masing-masing pemegang jabatan baik struktural maupun non struktural guna peningkatan profesionalisme dan kinerja.

8.4. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar.

Visi dilaksanakannya Diklat adalah untuk meningkatkan kualitas Profesionalisme Aparatur agar memiliki keunggulan Kompetitif dan memegang teguh Etika Birokrasi sebagaimana yang di cita-citakan dan diharapkan, maka Pemerintah perlu membina Aparatur secara terus menerus dengan jelas, terarah, transparan dan sebagai salah satu jalur adalah melalui Pengembangan pola karier Pegawai Negeri Sipil dengan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan pola karir yang jelas, terarah dan transparan akan dapat merangsang pegawai dalam mengembangkan karir dan profesionalismenya.



Misi kegiatan Diklat yang dilaksanakan adalah untuk membangun sosok PNS yang *responsible* (bertanggungjawab), *progressive* (kemajuan), *cognition* (pengetahuan), *intelligence* (kecerdasan), *intellectual* (kepandaian intelek), *agility/aptitude* (tangkas) dalam mengambil suatu keputusan, tindakan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik;
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

8.5. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar.

Adapun Output yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar pada program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur sejak 2 Januari s.d 30 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Gaji berkala berjumlah : 183 orang
2. Kenaikan Pangkat berjumlah 72 orang antara lain :
 - Periode April 2019 berjumlah 58 orang
 - Periode Oktober 2019 berjumlah 14 orang
3. Cuti PNS berjumlah 246 orang terdiri dari :
 - Cuti alasan penting 16 orang
 - Cuti tahunan 195 orang
 - Cuti sakit 28 orang
 - Cuti bersalin 7 orang
4. Ijin Belajar PNS
 - S1 : 2 Orang
 - S2 : 2 Orang
5. Tugas Belajar : 2 Orang
 - S1 : 1 Orang
 - S2 : 1 orang
 - S3 : 1 Orang
6. Mutasi masuk berjumlah : 28 orang
7. Mutasi keluar instansi berjumlah : 2 orang
8. Usulan pensiun berjumlah : 13 orang
 - Batas usia Pensiun : 13 orang



9. Rekap Mahasiswa/siswa magang : 105 orang

8.6. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan menata buku bahan koleksi Perpustakaan
 - b. Melakukan penyimpanan pelestarian bahan pustaka terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dari jaman penjajahan Belanda tahun 1916, Surat Kabar Akcaya dari tahun 1977-1999, Surat Kabar Pontianak Post dari tahun 2000 -2019.
 - c. Mengolah data Buku Perpustakaan sesuai dengan Klarifikasinya berjumlah 732.090 buku.
 - d. Menjilid bahan pustaka yang rusak sebanyak 118 buku Deposit dan 25 Buku Referensi.
 - e. Menjilid Majalah /Koran :
 - Trubus bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 2 buku
 - Tempo bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 5 buku
 - Gatra bulan Januari sampai dengan Desember 2019 = 5 buku
 - Koran Pontianak Post dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 = 6 buku
 - f. Melayani pengunjung Perpustakaan dari bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 130 orang terdiri dari :
 - Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar
 - Pegawai dari Luar Instansi
 - Mahasiswa
 - Pelajar
 - Masyarakat
 - g. Waktu pelaksanaan Pengelolaan Perpustakaan dimulai bulan Januari s.d Desember 2019.
 - h. Kegiatan Perjalan Dinas
Terkait efisiensi Anggaran Tahun 2019, maka perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar tahun 2019 tidak dianggarkan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

8.7. Kegiatan Verifikasi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.

Maksud dilaksanakan Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memfasilitasi dan mendorong penyusunan dokumen ABK serta memverifikasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.



Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah agar setiap Biro mempunyai dokumen ABK yang menunjukkan jumlah yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

8.8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Kabupaten/Kota.

Maksud dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan PMPRB se Kalimantan Barat.

Sedangkan Tujuan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Mendapatkan gambaran mengenai penyusunan kebijakan terkait reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota;
- b. Mendapatkan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan rencana aksi dari setiap bidang perubahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi;
- c. Tersedianya bahan perumusan kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
- d. Pelaksanaan PMPRB di Kabupaten/Kota.

8.9. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar.

Maksud diadakannya kegiatan ini agar Terwujudnya standar kompetensi jabatan bagi pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi, yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat jabatan untuk mendukung sistem merit dalam manajemen ASN.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan dalam menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit sehingga tercapai profesionalisme aparatur.
- b. Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



8.10. Kegiatan Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dilingkungan Pemprov. Kalbar

Maksud dari kegiatan ini adalah agar Perangkat Daerah/Biro/UPT dapat menyusun standar kompetensi jabatan bagi kelompok Jabatan Administrasi, yang sesuai dengan kualifikasi dan syarat jabatan untuk mendukung sistem merit dalam manajemen ASN.

Tujuan dari Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

- Sebagai acuan dalam menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit sehingga tercapai profesionalisme aparatur.
- Perangkat Daerah/Biro/UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun standar kompetensi jabatan yang menjadi lingkup kewenangannya

8.11. Kegiatan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar Tahun 2019.

Maksud dilaksanakan Penyusunan Formasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan dalam perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah agar Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

9. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

9.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini adalah melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan dan sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.



9.2. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Pemprov Kalbar adalah untuk menindaklanjuti Diktum Ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Tujuan Penyusunan Perjanjian kinerja itu sendiri yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

9.3. Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum Tahun 2019 di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.
2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja
3. Memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.

9.4. Kegiatan Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya fasilitasi ini adalah :

1. Memberikan arahan / saran perbaikan terhadap dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Berjenjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Forum sharing informasi / konsultasi dan koordinasi terkait alur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar tercipta



keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaporan kinerja.

9.5. **Kegiatan Workshop SAKIP**

Hasil Pelaksanaan Workshop SAKIP adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan **Workshop SAKIP** dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 November 2019 bertempat di Kementerian PAN dan RB. Workshop SAKIP dilaksanakan bagi 45 Perangkat Daerah.
- b. Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Prov. Kalbar, Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Sub Bagian Renja/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Narasumber dari Kementerian PAN dan RB terdiri dari :
 - Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah II pada Kementerian PAN dan RB;
 - Asdep Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah II, Ibu Dra. Nadimah, M.BA;
 - Ibu Dra. Endang Purwaningsih, MAP selaku Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - Novan Kharisma Salainti, S.IAN selaku Analis pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi RB Kunwas Wilayah II.

d. Adapun peserta yang hadir sebanyak 120 orang.

Kegiatan Workshop SAKIP dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu kelas pembahasan RPJMD (pesertanya BAPPEDA Provinsi), dan dua kelas diisi oleh Perangkat Daerah Pemprov. Kalbar dan ruang yang digunakan yaitu ruang sriwijaya, ruang bone dan ruang serbaguna. Materi yang dipaparkan oleh Perangkat Daerah mengenai Cascading (penjabaran masing-masing kinerja) Perangkat Daerah.

Berikut ini ditampilkan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama selama Tahun 2019-2021:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah								
	Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%	4 Unit		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	750 Lbr	750 Lbr	825 Materai	413 Materai	50%	900 Lembar		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	20800 lembar	20800 lembar	22800 lembar	6352 lembar	28%	25000 lembar		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum	600 porsi (snack box + Nasi Kotak)	600 porsi (snack box + Nasi Kotak)	660 porsi (snack box + Nasi Kotak)	171 porsi (snack box + Nasi Kotak)	26%	730 porsi (snack box + Nasi Kotak)		
	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	3 Laporan (6 Bulan)	10%	1 tahun		
	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 Bulan	50%	12 bulan		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1	4 unit	4 unit	4 Unit	2 Unit	50%	4 Unit		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
		tahun								
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara selama 1 tahun	16 Unit	16 Unit	11 Unit	4 Unit	24%	11 Unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	PC 14 Unit, Laptop 12 Unit, printer 31 Unit	PC 14 Unit, Laptop 12 Unit, printer 31 Unit	62 Unit	0 Unit	0%	62 Unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS Setda yang mengikuti Diklat	1 tahun	1 tahun						
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 tahun	1 tahun						
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja biro	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan								
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	4 laporan	4 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Laporan		
	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 Dokumen		
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Prosentase peningkatan pelaporan dan inventarisasi aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar								
	Penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen		
	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah PD yang ditata	17 PD	17 PD	19 PD			21 PD		
	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah PERDA perangkat daerah yang diubah	1 Perda	1 Perda						
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang akan disusun	3 Rancangan Pergub	3 Rancangan Pergub	2 Rancangan Pergub	9 Rancangan Pergub	450%	2 Pergub		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Tersedianya Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Cabang Dinas.	1 Pergub	1 Pergub						
	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang akan dilakukan penataan	5 Pergub	5 Pergub	2 Rapergub	19 Pergub UPT	950%	5 Rapergub UPT		
	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Jumlah Peserta yang akan mengikuti Rakortek bidang organisasi se Kalbar	80 Peserta	80 Peserta	65 Peserta	0 Peserta	0%	80 Peserta		
	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penataan PD Kab/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	100%	14 Kabupaten/Kota		
	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan PD Kab/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	65%	14 Kabupaten/Kota		
	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Tingkat Nasional di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan		
	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kab/Kota	Jumlah Data perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terintegrasi	Data Kelembagaan	Data Kelembagaan						
	Updating Database Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Data Kelembagaan Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota yang ter-update						Database Kelembagaan PD Provinsi dan Kab/Kota yang terupdate		
	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPT di lingk. Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan monev			23 UPT	23 UPT		24 UPT		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monev			15 PD	36 PD	42%	17 PD		
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah PD yang difasilitasi penataan kelembagaan PD Prov.			19 PD	0	0%	21 PD		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi PD			47 Perangkat Daerah	0	0%	47 PD		
	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Jumlah Dokumen/Laporan Kesepakatan Forum Sekretaris Daerah			1 Komisariat	1 Komisariat	100%	1 Komisariat		
	Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi Se Kalimantan	Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Regional bidang Organisasi Se Kalimantan						200 Peserta		
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR									
	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Anjab Perangkat Daerah Provinsi			24 Dokumen	5 Dokumen	21%			
	Penyusunan Peta Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Peta Jabatan Fungsional			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Dokumen ABK yang diverifikasi	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen SKJ Jabatan Administrasi dan jabatan Fungsional yang disusun			26 Dokumen	18 Dokumen	69%			
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen SKJ Jabatan Pimpinan Tinggi yang disusun			14 Dokumen	14 Dokumen	100%			
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat						1 Dokumen		
	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Monev Reformasi Birokrasi Kab/Kota						4 Kab/Kota		
	Pembinaan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/ Kota	Jumlah Kab/ Kota yang dibina			9 Kab/ Kota	-	0%			
	Pembinaan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina			10 PD	-	0%			
	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan pengembangan Budaya Kerja			14 Kab/ Kota	-	0%			
	Peningkatan Kompetensi Pengembangan Budaya Kerja	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengembangan Budaya Kerja			Pejabat Struktural dan Fungsional	-	0%			
	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kebijakan Penerapan Ketatalaksanaan yang ditetapkan								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Asisten Penyusunan SOP pada PD/UPT dilingkungan Pemprov.	Persentase Perangkat Daerah/UPT yang menyusun SOP	70%	70%	100%	-	0%	100%		
	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan standarisasi, sistem dan prosedur pada Kab/Kota			-	-		5 Laporan		
	Penyusunan Pergub tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan tentang TND			1 Pergub	1 Draf Pergub	100%	1 kebijakan		
	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Prosentase kehadiran pada rakor tingkat nasional bidang Ketatalaksanaan		3 Laporan	-	-	-	100%		
	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi			-	-	-			
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemprov. Kalbar	1 Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 Peraturan Gubernur	1 Draf Pergub	100%			
	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis			1 Dokumen	1 Draft Dokumen	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat								
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi pelayanan publik Pemprov. Kalbar	12 Inovasi	12 Inovasi	13 Inovasi	2 Inovasi	15%	15 inovasi		
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	45 PD/UPT/Biro	45 PD/UPT/Biro	114 PD/UPT/Biro	45 PD/UPT/Biro	39%	45 PD/UPT/Biro		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	14 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	-		1 Laporan		
	Penyusunan Pergub tentang kode etik Pelayanan Publik	Jumlah Kebijakan tentang Kode Etik Pelayanan Publik			1 Pergub	-	0%			
	Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat.			-					
	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			-					
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Laporan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Prosentase Peningkatan pengembangan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah								
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah PD yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	75%	75%	46 PD	46 PD	100%	37 Perangkat Daerah		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2021 (%)
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi			-					
	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Kab/Kota yang telah dibina			5 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	100%	5 Kab/Kota		
	Workshop SAKIP	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop SAKIP			46 PD	-	0%	45 Perangkat Daerah		



B. ANALISIS PELAYANAN KINERJA BIRO ORGANISASI

Analisis kinerja pelayanan Biro Organisasi berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :



TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/ Stándar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		PROYEKSI		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi tepat ukuran selaras dengan kinerjanya			46%	51%	57%	62%	73%		57%	62%	
	1. Jumlah Perangkat Daerah yang ditata			17PD	19 PD	21PD	23 PD	23 PD		21PD	23 PD	
2.	Prentase IKM Perangkat Daerah yang berkategori baik			83	85	87	89	83,17		87	89	
	1. IKM Pemerintah Provinsi Kalbar			85%	87%	89%	91%	91%		89%	91%	
	2. Jumlah kebijakan penerapan standar, sistem dan prosedur			3 Keb	4 Keb	5 Keb	6 Keb	6 Keb		5 Keb	6 Keb	
3.	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur			20%	40%	60 %	80 %	20%		60 %	80 %	
	1. Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur			20%	40%	60 %	80 %	80 %		60%	80 %	
	2. Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			16%	32%	48 %	64 %	64 %		48%	64 %	
	3. Prosentase peningkatan pengelolaan bahan pustaka			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4.	Komponen SAKIP pelaporan kinerja			10,5	11	11,5	12	10,52		11,5	12	
	1. Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	



C. ISU-ISU PENTING PEYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai berikut :

- a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
- b. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di Perangkat Daerah yang melayani langsung ke masyarakat.
- c. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
- d. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanaan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
- e. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
- f. Masih terdapat penyajian analisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensif.
- g. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
- c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
- d. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
- e. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- f. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah untuk membuat analisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
- g. Memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional berdasarkan kewenangan karakteristik dan potensi daerah.
2. Perubahan dan perkembangan kebijakan aparatur.



3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perlunya peningkatan kemampuan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok.

D. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 mengalami perubahan kegiatan dan program dari tahun-tahun sebelumnya. Khususnya penambahan pada kegiatan Budaya Kerja, Kegiatan dan program tersebut diselenggarakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan program dan kegiatan tahun 2020 dibuat sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada pada table 2.3.



TABEL. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	342.148.700						
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditanggung jasa pembayaran pajaknya selama 1 tahun	4 unit	3.500.000	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditanggung jasa pembayaran pajaknya selama 1 tahun	4 unit	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1 tahun	3.750.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1 tahun	4.125.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	30.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	660 Porsi	33.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Penggandaan selama 1 tahun	20.800 lbr	6.240.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Penggandaan selama 1 tahun	20.800 lbr	4.764.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Pontianak	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 dokumen	218.964.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Pontianak	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 Tahun	218.964.000	
	Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan penataan dan pemeliharaan arsip	12 bulan	79.694.700	Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan penataan dan pemeliharaan arsip	12 bulan	67.738.300	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpeliharanya aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	100%	68.258.000						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	4 unit	33.858.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	4 unit	33.858.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas	Pontianak	Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	10.800.000	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas	Pontianak	Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	10.800.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Pontianak	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	62 Unit	23.600.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Pontianak	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	62 Unit	23.600.000	
III	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%							
	Pendidikan dan Latihan	Dalam/ luar daerah	Jangka waktu pelaksanaan Diklat	30 PNS	230.000.000	Pendidikan dan Latihan	Dalam/ luar daerah	Jangka waktu pelaksanaan Diklat	-	-	
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan workshop	40 PNS	70.807.750	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan workshop	-	-	
	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pontianak	-	-	0						
	Penyusunan Analisis Jabatan	Pontianak	-	-	0						
	Penyusunan SOP	Pontianak	-	-	0						
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Pontianak	Jumlah Perjanjian Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	17.249.800	Penyusunan Penetapan Kinerja	Pontianak	Jumlah Perjanjian Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	18.974.700	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		Tersedianya dokumen laporan kinerja dan keuangan	100%	219.743.300						
	Penyusunan Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semsteran dan Tahunan yang tersusun	1 dokumen	28.202.500	Penyusunan Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semsteran dan Tahunan yang tersusun	1 dokumen	30.873.000	
	Penyusunan LAKIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2018 yang tersusun	1 dokumen	12.217.600	Penyusunan LAKIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2018 yang tersusun	1 dokumen	13.365.000	
	Penyusunan RENJA	Pontianak	Jumlah Dokumen RENJA Biro Tahun 2020 yang tersusun	1 dokumen	23.500.000	Penyusunan RENJA	Pontianak	Jumlah Dokumen RENJA Biro Tahun 2020 yang tersusun	1 dokumen	25.525.000	
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2018 yang tersusun	2 dokumen	19.421.800	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2018 yang tersusun	2 dokumen	20.413.000	
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2020 dan DPA SKPD Tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	21.837.700	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2020 dan DPA SKPD Tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	23.022.000	
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Jangka waktu pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi	1 tahun	114.563.700	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Jangka waktu pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi	1 tahun	81.958.500	
V	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Pontianak	Peningkatan Pelaporan Aset Biro	100%	12.321.700						
	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Ivetarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	12.321.700	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Ivetarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	13.004.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah										
						Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	15 PD	62.503.700	
						Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPT di Lingkungan Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23 UPT	55.938.800	
						Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Provinsi Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah Kab/Kota	14 kab/kt	84.204.200	
	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Provinsi Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	14 kab/kt	68.609.400	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Provinsi Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	14 kab/kt	103.144.000	
	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah hasil rumusan rekomendasi Rakor Teknis Bidang Organisasi	1 rekomendasi	78.600.000	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Pontianak	Jumlah hasil rumusan rekomendasi Rakor Teknis Bidang Organisasi	65 Peserta	151.023.800	
	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah yang akan dilakukan penataan	5 UPT	66.962.300	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah yang akan dilakukan penataan	2 Rapergub UPT	69.838.200	
	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Pontianak	Jumlah data perangkat daerah yang terintegrasi	Data kelembagaan PD	37.660.000	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Pontianak	Jumlah data perangkat daerah yang terintegrasi			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	47 PD Prov. Dan 14 Kab/Kota	83.673.800	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Prov. Kalbar	Jumlah Pembentukan Komisariat Forsesdasi Prov. Kalbar	1 Komisariat	56.642.0000	
	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PERDA perangkat daerah yang diubah	1 Perda	147.914.000	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PERDA perangkat daerah yang diubah			
	Penyusunan Pergub tentang Tugas Pokok dan Fungsi PD Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi PD Prov. Kalbar yang akan disusun	3 Pergub	35.603.200	Penyusunan Pergub tentang Tugas Pokok dan Fungsi PD Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi PD Prov. Kalbar yang akan disusun	2 Rapergub	50.875.600	
	Penyusunan Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas	Prov. Kalbar	Tersedianya Pergub ttg Pembentukan Cabang Dinas	1 Pergub	69.225.700	Penyusunan Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas	Prov. Kalbar	Tersedianya Pergub ttg Pembentukan Cabang Dinas			
	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan PD	Luar Prov. Kalbar	Jumlah Laporan Kordinasi Tk. Nasional di Bid. Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	33.930.000	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan PD	Luar Prov. Kalbar	Jumlah Laporan Kordinasi Tk. Nasional di Bid. Kelembagaan Perangkat Daerah			
VII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 Laporan	47.338.000	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 Laporan	54.317.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	5 kab/kota	61.530.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	6 kab/kota	93.767.000	
	Inovasi Pelayanan Publik	Pontianak	Jumlah inovasi pelayanan publik	12 Inovasi	68.720.000	Inovasi Pelayanan Publik	Pontianak	Jumlah inovasi pelayanan publik	13 Inovasi	112.817.700	
	Fasilitasi peningkatan kinerja penyeleggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi (zona hijau) terhadap standar pelayanan publik di Prov. Kalbar	10 Perangkat Daerah/ UPT							



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monev penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan evaluasi	45 PD/Biro dan UPT	122.148.700	Monev penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan evaluasi	114 PD/Biro dan UPT	141.490.000	
						Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kebijakan tentang kode etik Pelayanan Publik	1 Pergub	69.071.700	
						Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	250 Org	75.908.000	
						Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Prov. Kalbar	Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	250 Org	65.913.000	
VIII	Penataan Ketatalaksanaan		Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah		615.475.700						
	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Dalam/ Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi penataan ketatalaksanaan	1 laporan	40.570.000						
	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait penataan ketatalaksanaan	7 Kab/kota	50.947.500	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Prov. Kalbar	Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/ Kota	5 Laporan	70.857.800	
						Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Prov. Kalbar	Jumlah PD yang mengikuti Sosialisasi	45 PD	80.932.000	
						Penyusunan Peta Proses Bisnis	Pontianak	Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dokumen	143.314.400	
						Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Naskah Dinas	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	86.648.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Pontianak	Jumlah Laporan SPM yang disusun	1 Laporan							
	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kebijakan tentang pakaian dinas	1 Pergub	34.487.500	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Pontianak	Jumlah Kebijakan tentang pakaian dinas	1 Pergub	55.985.000	
	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah PD/UPT yang mengikuti sosialisasi bidang TND	90 Peserta	54.438.000						
	Asistensi Penyusunan SOP pada UPT dilingkungan Pemprov. Kalbar	Pontianak	Persentase PD/UPT yang menyusun SOP	70%	65.000.000						
VIII	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur		917.203.050						
						Penyusunan Peta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Dokumen Formasi Jabatan Fungsional	1 Dokumen	72.282.700	
	Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan formasi ASN	15 dokumen	56.658.900	Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan formasi ASN	-	-	
	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional yang ditetapkan	1 dokumen	42.199.800						
	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan ABK dilingkungan Prov. Kalbar yang dilakukan verifikasi	9 dokumen	76.834.300	Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen ABK dilingkungan Pemprov. Kalbar yang diverifikasi	12 dokumen	117.348.100	
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Pontianak	Jumlah dokumen Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar 2019-2024 yang disusun	1 dokumen	80.165.900	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map RB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	228 Peserta	102.236.100	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Verifikasi Penyusunan Anjab di Prov. Kalbar	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Anjab Perangkat Daerah/biro/upt yang telah diverifikasi	1 Dokumen	120.166.300	
						Pembinaan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada KabKota	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/ Kota yang Di Monev	9 Kab/ Kota	108.725.400	
	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen standar kompetensi JPT diligkungan Pemprov. Kalbar	27 dokumen	104.078.500	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen standar kompetensi JPT diligkungan Pemprov. Kalbar	14 dokumen	52.718.300	
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Koa se-Kalbar	Pontianak	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monev penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN	11 Kab/kota							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Frekuensi kegiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur setda prov. Kalbar	1 Tahun	108.930.000						
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian diligkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	9 Dokumen	95.608.700	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian diligkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	-	-	
	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	1 Kali	18.879.600						
	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Monev RB Kab/Kota	4 Kab/Kota	68.283.700						
	Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi diligkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah dokumen SKJ Administrasi diligkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen SKJ	105.143.100	Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi dan JPT diligkungan Pemprov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen SKJ Administrasi diligkungan Pemprov. Kalbar	26 Dokumen SKJ	113.996.200	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembinaan Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi	10 PD	93.091.650	
						Penyusunan Rumusan Nilai-Nilai Prilaku Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Kalbar	Dalam Daerah	Jumlah Rumusan Nilai-Nilai Prilaku Budaya Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah OPD	57.857.300	
						Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja di Provinsi Kalimantan Barat	Dalam Daerah	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengembangan Budaya Kerja	14 Kab/ Kota	110.794.500	
						Peningkatan Kompetensi Pengembangan Budaya Kerja	Dalam Daerah	Tertindakannya Peningkatan Kompetensi Pengembangan Budaya Kerja	Pejabat Struktural dan Fungsional	106.091.000	
IX	Pengembangan Pengawasan dan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Peningkatan Pengawasan dan Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		405.740.100						
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	1 dokumen	78.399.000	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	1 dokumen	103.561.000	
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Perjanjian kinerja pemerintah prov. Kalbar	1 dokumen	23.050.000	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Perjanjian kinerja pemerintah prov. Kalbar	1 dokumen	22.993.000	
	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah PD yang mengikuti asistensi penyusunan LKJ dan Perjanjian	37 Perangkat Daerah	36.400.000	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah PD yang mengikuti asistensi penyusunan LKJ dan Perjanjian	46 Perangkat Daerah	96.388.000	
						Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan di evaluasi	46 PD	46.849.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	12	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang telah dibina	5 kab/kota	94.147.200	Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang telah dibina	5 kab/kota	106.042.000	
	Workshop SAKIP	Pontianak	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop SAKIP	45 PD	173.743.900	Workshop SAKIP	Pontianak	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop SAKIP	46 PD	154.676.900	
X	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
	Pembinaan Mental/ Spritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan mental/ spritual	45 PNS	88.475.800	Pembinaan Mental/ Spritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan mental/ spritual			
	Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah PNS Setda yang mengikuti Diklat	30 PNS	230.000.000	Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah PNS Setda yang mengikuti Diklat			
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, dan Workshop	40 PNS	70.807.750	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek, dan Workshop			
	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	1980 (60x33)	129.253.300	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya			
XI	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka										
	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar dalam 1 tahun	100 orang	38.449.700	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah bahan pustaka yang telah diolah	50 Buku	56.772.500	
	Jumlah Seluruhnya				3.337.059.950						



E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi selama ini tidak ada.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Ada 7 (tujuh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, yaitu:

- 1) Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Meningkatkan Kecerdasan Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- 4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 5) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
- 6) Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.
- 7) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).

Tujuan sebagai berikut: **“Terwujudnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**.

2. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Untuk itu Biro Organisasi telah menetapkan sasaran, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Barat.



- 2) Meningkatnya Kelembagaan Provinsi yang Efektif dan Efisien sesuai dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- 3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota.
- 4) Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2021 pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdiri dari:

1. Program Penataan Organisasi

Sasaran Program:

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah.
- Meningkatnya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- Tersedianya dokumen manajemen SDMA yang terverifikasi sesuai peraturan.
- Meningkatnya kelembagaan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah provinsi.
- Meningkatnya penyajian informasi laporan kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja Program (*Outcome*):

- Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik.
- Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Persentase dokumen manajemen SDMA Perangkat Daerah terverifikasi.
- Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan RB.
- Persentase Kab/Kota dengan nilai RB meningkat.
- Persentase LKj PD yang memuat informasi kinerja.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Sasaran kegiatan:

- Tersedianya Raperda/Perda, Rapergub/Pergub Kelembagaan Provinsi.
- Terverifikasinya ANJAB dan ABK, EVJAB dan SKJ di Provinsi Kalbar.
- Tersedianya rekomendasi kebijakan bidang kelembagaan kabupaten/kota.

Indikator Keluaran (*Output*):

- Jumlah Raperda/Perda, Rapergub/Pergub Kelembagaan Provinsi yang disusun.
- Jumlah dokumen SDMA yang terverifikasi.
- Jumlah rekomendasi Kebijakan bidang Kelembagaan bagi kabupaten/kota.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi.
-



- b) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota.
- c) Penataan Analisis Jabatan.

2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran kegiatan:

- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada Provinsi Kalbar.
- Terlaksananya penyusunan dan pembinaan tatalaksana pada Provinsi Kalbar.
- Terlaksananya Pembinaan RB ke PD Prov dan Kab/Kota.
- Terlaksananya Evaluasi Penerapan Budaya Kerja pada PD Prov dan Kab/Kota.
- Terlaksananya penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

Indikator Keluaran (Output):

- Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang baik dan berkualitas (zona hijau).
- Persentase perangkat daerah yang menetapkan dokumen tatalaksana (SOP dan Peta Proses Bisnis).
- Persentase kab/kota yang dilakukan pembinaan.
- Persentase peningkatan PD yang melaksanakan RB.
- Persentase Kab/Kota yang dibina.
- Jumlah PD Provinsi dan Kab/ Kota yang dievaluasi.
- Persentase laporan kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
- b) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan.
- c) Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d) Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja.
- e) Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sasaran Program :

- Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan dan laporan kinerja PD.
- Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah PD.
- Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah PD.
- Meningkatnya penerapan manajemen SDM aparatur PD.
- Meningkatnya kualitas layanan internal.

Indikator kinerja Program (*Outcome*):

- Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu.
 - Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.
 - Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar.
 - Persentase tingkat Disiplin Aparatur.
-



- Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur.
- Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik".
- Nilai Kepuasan Layanan Internal.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran kegiatan:

- Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dan penganggaran.
- Meningkatnya kualitas penyusunan laporan kinerja.

Indikator Keluaran (Output):

- Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu.
- Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan: Meningkatnya pemenuhan laporan keuangan.

Indikator Keluaran (Output): Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan: Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan:

- Meningkatnya disiplin ASN dinas.
- Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian
- Meningkatnya pengelolaan kinerja Pegawai

Indikator Keluaran (Output):

- Jumlah pelanggaran disiplin ASN.
 - Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur.
 - Persentase ASN yang mengisi data ASN
 - Persentase ASN yang menyusun dan melaporkan Kinerja tepat waktu
-



Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- c) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- d) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan: meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah.

Indikator Keluaran (Output): persentase pemenuhan barang.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan: Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Indikator Keluaran (Output): Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan: Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah.

Indikator Keluaran (Output): Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik.

Sub Kegiatan dilakukan antara lain:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rumusan rencana program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 dituangkan dalam tabel berikut:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 PROVINSI KALIMANTAN BARAT									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PENUNJANG				5,492,477,530.00				6,852,054,751.00
3.07	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI				5,492,477,530.00				6,852,054,751.00
3.07.01	BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR				5,492,477,530.00				6,852,054,751.00
3.07.01.01	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR				5,492,477,530.00				6,852,054,751.00
		Indeks RB Provinsi	Provinsi Kalbar	BB				BB	
		Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	84.00	1,217,649,000	DAU		84.20	1,422,496,458
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat baik	Provinsi Kalbar	20%				25%	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah dengan standar pelayanan publik yang baik dan berkualitas (zona hijau)	Provinsi Kalbar	87%				89%	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	59,749,300	DAU		1 Laporan	65,724,230
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat	28 Inovasi	124,099,400	DAU		34 Inovasi	136,509,340
		Jumlah Perangkat Daerah/Biro yang di monitoring dan dievaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	47 PD/Biro	155,639,000	DAU		46 PD/Biro	171,202,900
		Jumlah Pergub tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	75,978,800	DAU			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	83,498,800	DAU		100 Orang	91,848,680
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Survey Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	65,913,000	DAU		100 Orang	72,504,300
		Jumlah Pergub Pelayanan Publik	Provinsi Kalimantan Barat					1 Pergub	68,380,920
		Jumlah Kab/ Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung	Provinsi Kalimantan Barat	6 Kab/ Kota	103,143,700	DAU		8 Kab/ Kota	113,458,070
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase perangkat daerah yang menetapkan dokumen tatalaksana (SOP dan Peta Proses Bisnis)	Provinsi Kalimantan Barat	100%				100%	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah/Biro yang dimonitoring dan dievaluasi (Peta proses Bisnis, SOP, Tata Naskah Dinas)	Provinsi Kalimantan Barat	47 PD/Biro	78,537,800	DAU		46 PD/Biro	157,075,600
		Jumlah Perangkat Daerah/ Biro yang SOP telah diverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	47 PD/Biro	103,281,200	DAU			
		Jumlah Perangkat Daerah/ Biro yang mengikuti sosialisasi peta Proses Bisnis	Provinsi Kalimantan Barat	47 PD/Biro	77,653,000	DAU			
		Jumlah Perangkat Daerah/UPT yang SOP telah diverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat					101 PD/Biro/UPT	123,340,718
		Jumlah Peraturan Gubernur Bidang Tatalaksana	Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	55,985,000	DAU		1 Pergub	61,583,500
		Jumlah Perangkat Daerah/ Biro/UPT yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas	Provinsi Kalimantan Barat					101 PD/Biro/UPT	103,281,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis Provinsi Kalimantan Barat yang dievaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	114,170,000	DAU		1 Dokumen	125,587,000
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase kab/kota yang dilakukan pembinaan	Provinsi Kalimantan Barat	100%				100%	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan bidang ketatalaksanaan	Provinsi Kalimantan Barat	5 Kab/ Kota	120,000,000	DAU		5 Kab/ Kota	132,000,000
		Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah	Provinsi Kalimantan Barat	100%	1,383,989,000	DAU		100%	1,923,959,700
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penataan sesuai peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Barat	5 PD				2 PD	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Raperda/Perda, Rapergub/Pergub Kelembagaan Provinsi yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat	6				4	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat					16 PD	71,879,300
		Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat					16 UPT	91,098,800
		Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur tentang penataan UPT	Provinsi Kalimantan Barat	2 Rapergub UPT	80,314,000	DAU			
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat	1 Raperda	175,000,000	DAU			
		Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat	2 Rapergub	58,507,000	DAU		2 Rapergub	64,357,700
		Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur tentang pembentukan cabang dinas yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat					1 Rapergub Cabdin	75,000,000
		Jumlah Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terupdate	Provinsi Kalimantan Barat	Data Kelembagaan PD Provinsi dan Kab/ Kota yang ter-update	60,724,000	DAU		Data Kelembagaan PD Provinsi dan Kab/ Kota yang ter-update	66,796,400
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Perangkat Daerah yang terverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	100%				100%	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Sumber Daya Manusia Aparatur yang terverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	29				19	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang terverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	8 Dokumen	200,000,000	DAU		8 Dokumen	220,000,000
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Administrasi Perangkat Daerah yang terverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	6 Dokumen	115,657,500	DAU		6 Dokumen	127,223,250
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi JPT Perangkat Daerah yang tersusun	Provinsi Kalimantan Barat	4 Dokumen	130,626,100	DAU		4 Dokumen	143,688,710
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab Perangkat Daerah yang diverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	10 Dokumen	110,000,000	DAU			
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Peta Jabatan penyederhanaan birokrasi yang tersusun	Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	83,125,200	DAU		1 Dokumen	91,437,720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rekomendasi Kebijakan bidang Kelembagaan bagi kabupaten/kota	Provinsi Kalbar	5				5	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Kordinasi Teknis bidang organisasi se Kalimantan Barat	Provinsi Kalbar	80 Peserta	89,446,400	DAU		80 Peserta	98,391,040
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan penataan Perangkat Daerah	Provinsi Kalbar	14 Kab/ Kota	118,615,600	DAU		14 Kab/ Kota	130,477,160
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Provinsi Kalbar	14 Kab/ Kota	96,834,900	DAU		14 Kab/ Kota	106,518,390
		Jumlah Peserta yang akan mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Provinsi Kalbar						
		Jumlah Dokumen/Laporan Kesepakatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	65,138,300	DAU		1 Dokumen	71,652,130
		Jumlah Rekomendasi yang dilakukan evaluasi penataan Perangkat Daerah dan UPTD Kab/Kota	Provinsi Kalbar					4 Rekomendasi	150,000,000
		Jumlah Rekomendasi Penilaian Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Provinsi Kalbar					1 Rekomendasi	150,000,000
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan	Provinsi Kalbar dan Luar Kalbar					250 Orang	265,439,100
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	Provinsi Kalbar	100%	1,057,469,430	DAU		100%	1,726,801,233
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalbar	47 Perangkat Daerah		DAU		45 Perangkat Daerah	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Provinsi Kalbar	1 Laporan	100,000,000	DAU		1 Laporan	110,000,000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi / Internalisasi Road Map RB Pemprov Kalbar	Provinsi Kalbar	100 Peserta	125,000,000	DAU		100 Peserta	137,500,000
		Jumlah Laporan Data Aplikasi Prima yang terupdate	Provinsi Kalbar					1 Laporan	150,000,000
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina	Provinsi Kalbar	10 PD	102,400,900	DAU		13 PD	112,640,990
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi meningkat	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	Provinsi Kalbar	5 Kabupaten/ Kota		DAU		5 Kabupaten/ Kota	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	Provinsi Kalbar	5 Kab/ Kota	119,598,000	DAU		5 Kab/ Kota	131,557,800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Kab/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalbar	1 Laporan	150,093,130	DAU		1 Laporan	165,102,443
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Pergub pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalbar	47 PD dan 14 Kab/ Kota	146,734,300	DAU			
		Jumlah Laporan Pembinaan Budaya Kerja Kab/ Kota	Provinsi Kalbar					1 Laporan	150,000,000
		Jumlah Laporan Penyusunan Rumusan Nilai-Nilai Budaya Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalbar	1 Laporan	63,643,100	DAU		1 Laporan	70,000,000
		Jumlah Laporan kompetisi Budaya Kerja Pemerintah Provinsi	Provinsi Kalbar					1 Laporan	250,000,000
		Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	Provinsi Kalbar	120 Anggota	250,000,000	DAU		120 Anggota	250,000,000
		Jumlah Laporan penilaian Budaya kerja Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalbar					1 Laporan	200,000,000
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Provinsi Kalbar	11.5	803,370,100	DAU		12	645,797,360
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang memuat informasi kinerja	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase laporan kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	Provinsi Kalbar	100%				100%	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah LKJ pemprov kalbar yang disusun tepat waktu	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	113,917,100	DAU			
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemprov yang disusun	Provinsi Kalbar	1 Laporan	125,000,000	DAU		1 Laporan	137,500,000
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Di evaluasi	Provinsi Kalbar	47 Perangkat Daerah	100,000,000	DAU			
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjankin) Pemerintah Provinsi Kalbar	Provinsi Kalbar	1 Dokumen	25,292,300	DAU		1 Dokumen	27,821,530
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang diasistensi	Provinsi Kalbar	47 Perangkat Daerah	106,026,800	DAU		46 Perangkat Daerah	116,629,480
		Jumlah Perangkat daerah (PD) yang di monitoring dan evaluasi	Provinsi Kalbar	47 Perangkat Daerah	51,533,900	DAU		46 Perangkat Daerah	56,687,290
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	Provinsi Kalbar	5 Kabupaten/ Kota	111,600,000	DAU		5 Kabupaten/ Kota	120,000,000
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang mengikuti workshop SAKIP	Provinsi Kalbar	47 Perangkat Daerah	170,000,000	DAU		46 Perangkat Daerah	187,159,060
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu	Pontianak	100%	1,030,000,000	DAU		100%	1,133,000,000
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	Pontianak	100%	110,000,000	DAU		100%	121,000,000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	40,000,000	DAU		1 Dokumen	44,000,000
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	30,000,000	DAU		1 Dokumen	33,000,000
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	11,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	10,000,000	DAU		1 Dokumen	11,000,000
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD yang disusun	Pontianak	1 Dokumen	20,000,000	DAU		1 Dokumen	22,000,000
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu	Pontianak	100%	70,000,000	DAU		100%	77,000,000
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja yang disusun	Pontianak	2 Dokumen	40,000,000	DAU		1 Dokumen	44,000,000
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Biro Organisasi yang disusun	Pontianak	2 Dokumen	30,000,000	DAU		2 Dokumen	33,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	Pontianak	100%				100%	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Pontianak	100%	60,000,000	DAU		100%	66,000,000
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Pontianak	5 Laporan	60,000,000	DAU		5 Laporan	66,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	Pontianak	100%				100%	
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pontianak	100%	40,000,000	DAU		100%	44,000,000
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	Pontianak	5 Laporan	40,000,000	DAU		5 Laporan	44,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	Pontianak	100%				100%	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pelanggaran disiplin ASN	Pontianak	0%	70,000,000	DAU		0%	77,000,000
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Pontianak	80 Stel	70,000,000	DAU		80 Stel	77,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	Pontianak	100%				100%	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	Pontianak	100%	20,000,000	DAU		100%	22,000,000
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK yang tersusun	Pontianak	2 Dokumen	20,000,000	DAU		2 Dokumen	22,000,000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengisi data ASN	Pontianak	100%	170,000,000	DAU		100%	187,000,000
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PPID yang terverifikasi	Pontianak	1 Laporan	170,000,000	DAU		1 Laporan	187,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik"	Pontianak	100%				100%	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menyusun dan melaporkan Kinerja tepat waktu	Pontianak	100%	10,000,000	DAU		100%	11,000,000
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Pontianak	12 Laporan	10,000,000	DAU		12 Laporan	11,000,000
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalbar	A				A	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan barang	Provinsi Kalbar	100%	295,000,000	DAU		100%	324,500,000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Pontianak	1400 Porsi	40,000,000	DAU		1500 Porsi	44,000,000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pontianak	2 Laporan	10,000,000	DAU		2 Laporan	11,000,000
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ekstemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pontianak	480 Ekstemplar	5,000,000	DAU		480 Ekstemplar	5,500,000
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material	Pontianak	1 Paket	20,000,000	DAU		1 Paket	22,000,000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Provinsi Kalbar dan Luar Daerah	19 Orang	80,000,000	DAU		20 Orang	88,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Paket yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pontianak	1 Paket/8 Unit	140,000,000	DAU		8 Unit	154,000,000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Provinsi Kalbar	100%	80,000,000	DAU		100%	88,000,000
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Internet	Pontianak	12 Bulan	80,000,000	DAU		12 Bulan	88,000,000
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Provinsi Kalbar	100%	105,000,000	DAU		100%	115,500,000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajak yang terbayarkan	Pontianak	4 Unit	5,000,000	DAU		4 Unit	5,500,000
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas, AC, Laptop, PC dan Printer yang terpelihara	Pontianak	78 Unit	100,000,000	DAU		78 Unit	110,000,000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2021 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dapat dilihat pada daftar lampiran Rencana Kerja (RENJA) ini.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Target Indikator Program	Indikator Keluaran	Target Keluaran	Indikator Hasil	Target Hasil	Sumber Dana	Pagu	Lokasi	Catatan Asistensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Data Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terupdate			Data Kelembagaan PD Provinsi dan Kab/ Kota yang terupdate			DAU	60,724,000	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Perangkat Daerah yang terverifikasi			100%			DAU		Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Sumber Daya Manusia Aparatur yang terverifikasi			29			DAU		Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang terverifikasi			8 Dokumen			DAU	200,000,000	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Administrasi Perangkat Daerah yang terverifikasi			6 Dokumen			DAU	115,657,500	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi JPT Perangkat Daerah yang tersusun			4 Dokumen			DAU	130,626,100	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Eviab Perangkat Daerah yang diverifikasi			10 Dokumen			DAU	110,000,000	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Peta Jabatan penyederhanaan birokrasi yang tersusun			1 Dokumen			DAU	83,125,200	Provinsi Kalimantan Barat		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan			100%			DAU		Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah rekomendasi Kebijakan bidang Kelembagaan bagi kabupaten/kota			5							
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Teknis bidang organisasi se Kalimantan Barat			80 Peserta			DAU	89,446,400	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan penataan Perangkat Daerah			14 Kab/ Kota			DAU	118,615,600	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengendalian Penataan Perangkat Daerah			14 Kab/ Kota			DAU	96,834,900	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Peserta yang akan mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen/Laporan Kesepakatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia			1 Dokumen			DAU	65,138,300	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Rekomendasi yang dilakukan evaluasi penataan Perangkat Daerah dan UPTD Kab/Kota										
		Jumlah Rekomendasi Penilaian Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota										
		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan										
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas			100%			DAU	1,057,469,430	Provinsi Kalbar		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi			100%							
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi			47 Perangkat Daerah			DAU		Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar			1 Laporan			DAU	100,000,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi / Internalisasi Road Map RB Pemprov Kalbar			100 Peserta			DAU	125,000,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Laporan Data Aplikasi Prima yang terupdate										
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina			10 PD			DAU	102,400,900	Provinsi Kalbar		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi meningkat			100%			DAU		Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina			5 Kabupaten/ Kota			DAU		Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina			5 Kab/ Kota			DAU	119,598,000	Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Kab/ Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi			100%			DAU		Provinsi Kalbar		
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi			1 Laporan			DAU	150,093,130	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Pergub pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			47 PD dan 14 Kab/ Kota			DAU	146,734,300	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Laporan Pembinaan Budaya Kerja Kab/ Kota										
		Jumlah Laporan Penyusunan Rumusan Nilai-Nilai Budaya Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat			1 Laporan			DAU	63,643,100	Provinsi Kalbar		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Target Indikator Program	Indikator Keluaran	Target Keluaran	Indikator Hasil	Target Hasil	Sumber Dana	Pagu	Lokasi	Catatan Asistensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan kompetisi Budaya Kerja Pemerintah Provinsi										
		Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek			120 Anggota			DAU	250,000,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Laporan penilaian Budaya kerja Perangkat Daerah Provinsi										
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja			11,5			DAU	803,370,100	Provinsi Kalbar		
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang memuat informasi kinerja			100%							
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase laporan kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu			100%							
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah LKJ pemrov kalbar yang disusun tepat waktu			1 Dokumen			DAU	113,917,100	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemrov yang disusun			1 Laporan			DAU	125,000,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Di evaluasi			47 Perangkat Daerah			DAU	100,000,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjankin) Pemerintah Provinsi Kalbar			1 Dokumen			DAU	25,292,300	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang diasistensi			47 Perangkat Daerah			DAU	106,026,800	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Perangkat daerah (PD) yang di monitoring dan evaluasi			47 Perangkat Daerah			DAU	51,533,900	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina			5 Kabupaten/ Kota			DAU	111,600,000	Provinsi Kalbar		
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang mengikuti workshop SAKIP			47 Perangkat Daerah			DAU	170,000,000	Provinsi Kalbar		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu			100%			DAU	1,030,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu			100%			DAU	110,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun			1 Dokumen			DAU	40,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun			1 Dokumen			DAU	30,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			1 Dokumen			DAU	10,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun			1 Dokumen			DAU	10,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD yang disusun			1 Dokumen			DAU	20,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja yang disusun tepat waktu			100%			DAU	70,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja yang disusun			2 Dokumen			DAU	40,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Biro Organisasi yang disusun			2 Dokumen			DAU	30,000,000	Pontianak		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP			100%							
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu			100%			DAU	60,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu			5 Laporan			DAU	60,000,000	Pontianak		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar			100%							
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%			DAU	40,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu			5 Laporan			DAU	40,000,000	Pontianak		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat Disiplin Aparatur			100%							
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pelanggaran disiplin ASN			0%			DAU	70,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas			80 Stel			DAU	70,000,000	Pontianak		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur			100%							
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur			100%			DAU	20,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK yang tersusun			2 Dokumen			DAU	20,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengisi data ASN			100%			DAU	170,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PPID yang terverifikasi			1 Laporan			DAU	170,000,000	Pontianak		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Target Indikator Program	Indikator Keluaran	Target Keluaran	Indikator Hasil	Target Hasil	Sumber Dana	Pagu	Lokasi	Catatan Asistensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pegawai dengan nilai kinerja "baik"			100%							
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menyusun dan melaporkan Kinerja tepat waktu			100%			DAU	10,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai			12 Laporan			DAU	10,000,000	Pontianak		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat			A							
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan barang			100%			DAU	295,000,000	Provinsi Kalbar		
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor			1400 Porsi			DAU	40,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan			2 Laporan			DAU	10,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Ekstemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			480 Ekstemplar			DAU	5,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material			1 Paket			DAU	20,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah			19 Orang			DAU	80,000,000	Provinsi Kalbar dan Luar Daerah		
4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Paket yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik			1 Paket/8 Unit			DAU	140,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%			DAU	80,000,000	Provinsi Kalbar		
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Internet			12 Bulan			DAU	80,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik			100%			DAU	105,000,000	Provinsi Kalbar		
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajak yang terbayarkan			4 Unit			DAU	5,000,000	Pontianak		
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas, AC, Laptop, PC dan Printer yang terpelihara			78 Unit			DAU	100,000,000	Pontianak		



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan Skala Prioritas Program dan Kegiatan. Rencana Kerja yang disusun ini terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut bersifat rutin/penunjang serta program dan kegiatan yang sifatnya prioritas. Program dan kegiatan rutin/penunjang ada 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, sedangkan program dan kegiatan prioritas ada 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan.

Untuk mendukung seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp.5.492.477.530,00 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja yang disusun ini masih perlu banyak penyempurnaan baik kegiatan-kegiatan maupun besaran pagu indikatifnya guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Pontianak, 31 Maret 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI

MARJANI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012